

## MENUJU PENDIDIKAN KEMANDIRIAN: Gagasan Penting dari Pesantren

Oleh:

**Rudi Ahmad Suryadi**

Dosen pada STISNU dan STAI al-Azhary Cianjur

[ahmadrudi97@yahoo.com](mailto:ahmadrudi97@yahoo.com)

**Uci Sanusi**

Dosen pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### Abstract:

**Abstrak:** *Kemandirian merupakan salah satu karakter yang harus dikembangkan. Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan kemandirian adalah pondok pesantren. Kemandirian santri di pondok pesantren dapat terbentuk karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut: Pondok pesantren menanamkan prinsip kemandirian dalam proses pembelajaran (pengajian) dan kurikulum; Pondok pesantren memberikan bekal berbagai macam life skill keterampilan pada santri sehingga mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; Pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan leadership (kepemimpinan) dan mengarahkan aplikasinya pada saat santri masih di pondok pesantren atau sudah terjun ke masyarakat; Pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan entrepreneursip (kewirausahaan) kepada santri agar mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan lingkungan sosialnya; dan Pondok pesantren tetap mempertahankan cara hidup yang penuh “ikhtiar”, tidak mengandalkan cara hidup yang instan.*

Kata Kunci: Pondok Pesantren dan Kemandirian

### A. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang ada dan diakui oleh masyarakat adalah pondok pesantren. Pondok pesantren yang secara istilah teknis berarti tempat tinggal santri ini memiliki aspek historis yang cukup lama dan sudah mengakar sebagai *subkultur* dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Pondok pesantren sebagai komunitas santri yang memfokuskan pada totalitas belajar tentang studi keislaman, merupakan harapan umat dalam membangun peradaban Islam pada masa mendatang dan membentuk tatanan masyarakat Indonesia yang harmonis dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Hal ini mengarah pula pada pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang pendidikan, pondok pesantren mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, peranan utama pondok pesantren adalah peranan pendidikan. Sistem pendidikan di pondok pesantren berbeda dengan sistem pendidikan yang terdapat pada lembaga pendidikan pendidikan umum. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi metodologi pendidikan dan otoritas pimpinan lembaga. Dalam hal ini, pondok pesantren dipimpin oleh kyai yang mempunyai otoritas dalam mengelola dan menerapkan metodologi pendidikan. Hal ini menjadi ciri perbedaan yang fundamental antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam tinjauan kelembagaan pendidikan, pondok pesantren mempunyai

---

<sup>1</sup>HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 52

---

<sup>2</sup>Marzuki Wahid, *et.al, Pondok pesantren Masa Depan*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 2002),h. 34

sesuatu yang unik.<sup>3</sup> Keunikan dan kekhasan pondok pesantren menarik sejumlah pakar dan tokoh "alumni" pondok pesantren untuk terus membahas dan mengkaji secara mendalam sisi-sisi kekhasannya.<sup>4</sup> Bahkan dalam level kebijakan dan kenegaraan, Departemen Agama RI menyediakan sebuah sektor khusus mengenai pondok pesantren, yang dinamakan dengan PDPONTREN berupa direktorat khusus.<sup>5</sup>

Pondok pesantren pada pandangan beberapa pemikir dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan *indigenuos* masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Pondok pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya baik dari sistem pendidikan maupun unsur pendidikan lainnya. Perbedaan dari segi sistem pendidikan terlihat dari proses pembelajaran yang cenderung tradisional, sekalipun sekarang ada beberapa

pondok pesantren yang mengkonvergensi diri dengan sistem pendidikan modern.

Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan sekaligus dalam pandangan sosiologis dipandang sebagai lembaga sosial yang secara informal terlibat dalam *society development*. Zamakhsyari Dhofier mengajukan lima unsur pokok pondok pesantren, yaitu : pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri, dan kyai.<sup>7</sup>

Pondok pesantren dalam bacaan teknis, seperti yang dikemukakan Abdurrahman Wahid merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang integral.<sup>8</sup> Pernyataan Gus Dur, sapaan Abdurrahman Wahid, mengenai keintegralan pendidikan pondok pesantren kemungkinan didasarkan pada sebuah pandangan mengenai keterpaduan pondok, masjid, pelaku (santri dan kyai), materi yang diajarkan yaitu pengkajian kitab kuning, yang satu sama lain saling mempengaruhi pada proses pembelajaran di pondok pesantren.

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial seperti yang ditawarkan oleh sistem pendidikan sekolah umum pada umumnya, sebagai budaya pendidikan nasional, menurut Gus Dur mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, pondok pesantren digolongkan ke dalam subkultur tersendiri di masyarakat Indonesia.<sup>9</sup>

Menurutnya, ada tiga elemen dasar yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang tidak terkooptasi oleh negara. *Kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, dan *ketiga*, sistem nilai yang

---

<sup>3</sup>Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pondok pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 5

<sup>4</sup> Pemikir dari Barat turut pula terlibat dalam dinamika pemikiran tentang pondok pesantren. Sebut saja Karel A Stenbrink dengan bukunya *Pondok pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), juga Martin Van Bruissen dengan buku populernya, *Kitab Kuning: Pondok pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995)

<sup>5</sup>Dulu pondok pesantren berdiri sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah. Pada dasawarsa 80 an, pemerintah merasa ikut bertanggung jawab atas eksistensi pondok pesantren. Departemen Agama pada mulanya memasukkan sektor pondok pesantren ini pada Pergurais. Kemudian Pergurais dipecah menjadi Mapenda dan Pekapontren, dan keduanya menjadi sektor tertentu. Hanun Asroah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 142

<sup>6</sup>Indigenous pondok pesantren didasari oleh sebuah pandangan bahwa pondok pesantren merupakan produk asli masyarakat Indonesia dalam bentuk sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional. Walaupun banyak pula orang yang memandang pola pendidikan pondok pesantren seperti pola pendidikan keagamaan agama Budha juga Hindu, atau pola *ma'had* di Timur Tengah. Namun, pondok pesantren tetap dipandang sebagai produk asli Indonesia. Lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 87. Lihat pula Muhammad Said, *Pendidikan dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Tarsito, 1987), h. 132, dan lihat pula Hanun Asroah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 74

---

<sup>7</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 44

<sup>8</sup>Abdurrahman Wahid, "Pesantren Masa Depan" dalam Marzuki Wahid (ed), *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 13

<sup>9</sup>*ibid.*

digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.<sup>10</sup>

Dengan modal elemen di atas, siapa pun akan menerima dan pasrah jika dikatakan kepadanya bahwa pondok pesantren memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Juga, kiranya tidak berlebihan jika pondok pesantren disebut sebagai salah satu pilar utama pendidikan di bumi Nusantara. Catatan sejarah membuktikan bahwa ribuan pondok pesantren telah berdiri, tumbuh, dan berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang ikut merasakan pola pembelajaran pondok pesantren.

Tiga elemen pokok pondok pesantren itu saling berkaitan satu sama lain dan bahkan dalam praktiknya yang sangat kompleks, hampir-hampir tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, dalam bentuk tantangan internal pondok pesantren memisahkan keterkaitan seluk beluk itu dengan mengekspos elemen dasar agar dapat mengubah pola dirinya. Sistem nilai yang secara khusus didasarkan pada nilai-nilai barakah, demikian kata Gus Dur, harus dimasukkan dalam ketentuan sekarang ini sebagai ijazah tertulis yang oleh pemerintah disebut sebagai bukti kompetensi (*proof of competence*).<sup>11</sup>

Bagaimanakah dengan eksistensi ketiga elemen pokok subkultur pada saat ini? Penulis berpandangan, ketiga elemen pokok tersebut masih tetap melekat sebagai sebuah ciri khas pondok pesantren. Kepemimpinan kyai sebagai *policy maker* bahkan sebagai penentu kebijakan tunggal kelembagaan pondok pesantren masih tetap berlaku, terutama di beberapa pondok pesantren yang masih mempertahankan tradionalitasnya. Hal ini dilakukan untuk menegaskan sebuah sistem nilai yang diusung pondok pesantren dan berimplikasi pada masyarakat sekitar pondok pesantren. Sosok kyai menjadi otoritatif dalam penegakan nilai-nilai kebijakan-religius sekaligus menjadi

representasi perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang diusung oleh sebuah komunitas masyarakat.

Pada perfektif pendidikan Nasional, pondok pesantren merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki karakteristik khusus. Secara legalitas, eksistensi pondok pesantren diakui oleh semangat Undang Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu ciri khas kehidupan di pondok pesantren adalah kemandirian santri, sebagai subjek yang memperdalam ilmu keagamaan di pondok pesantren. Kemandirian tersebut koheren dengan tujuan pendidikan nasional. Pada Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, kemandirian merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan. Pendidikan nasional tidak hanya bertujuan berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, akan tetapi bertujuan pula membentuk peserta didik yang mandiri.

Tujuan pendidikan nasional di atas merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena

<sup>10</sup>Abdurrahman Wahid,"Pondok pesantren Sebagai Subkultur", dalam M.Dawam Rahadjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), cet. iv

<sup>11</sup>*ibid*, h. 19

<sup>12</sup> Anonimous, *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grafika, 2008), hlm. 4

itu, jika dihubungkan dengan pendidikan karakter, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.<sup>13</sup>

### **B. Kemandirian Sebagai Sebuah Karakter yang Harus Dikembangkan**

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.<sup>14</sup>

Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.<sup>15</sup>

Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.<sup>16</sup>

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.<sup>17</sup>

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>18</sup>

Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman

---

<sup>13</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa)*, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 2

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>16</sup>*Ibid*

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>18</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 1

penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural. Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup>

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusakan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas. Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada: 1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila; 3) bergesernya nilai etika dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 5) ancaman disintegrasi bangsa; dan 6) melemahnya kemandirian bangsa.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan point ke 6 di atas, kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang semakin kukuh, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.<sup>22</sup>

Namun hingga saat ini sikap ketergantungan masyarakat dan bangsa Indonesia masih cukup tinggi terhadap bangsa lain. Konsekuensinya bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kurang memiliki posisi tawar yang kuat sehingga tidak jarang menerima kehendak negara donor meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan. Kurangnya kemandirian, juga tercermin dari sikap masyarakat yang menjadikan produk asing sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan, serta produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum kompetitif di dunia internasional.<sup>23</sup>

Seiring dengan konsep pendidikan karakter dan budaya bangsa ini, dapat diidentifikasi bahwa kemandirian merupakan salah satu nilai yang dikembangkan di antara delapan belas nilai yang dikembangkan. Pusat kurikulum Kemendiknas menyebutkan delapan belas nilai dan karakter yang dikembangkan yaitu sebagai berikut:

1. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>23</sup>*Ibid.*

- terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
  3. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
  4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
  5. Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
  6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
  7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
  8. Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
  9. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
  10. Semangat Kebangsaan: Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
  11. Cinta Tanah Air: Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
  12. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
  13. Bersahabat/Komunikatif; Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
  14. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
  15. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
  16. Peduli Lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
  17. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
  18. Tanggung-jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>
- Beberapa point di atas menunjukkan secara tegas bahwa nilai dan karakter mandiri merupakan salah satu hal penting yang perlu dikembangkan dalam konteks pendidikan. Kemandirian menjadi salah satu topik hangat yang dibicarakan dalam konteks pendidikan nasional terutama berkenaan dengan beberapa pengembangan konsep pendidikan yang menitikberatkan pada aspek karakter.

### **C. Memahami Kemandirian: Sebuah Pengantar**

Menurut Brewer yang dikutip oleh Medinnus dan Jonson bahwa,

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 9-10

*“The following behaviours were sign of independence : taking initiative, trying to overcome obstacles in the enviroment, trying to carry active to completron, getting satisfaction from work, and trying to routine task by one self, whereas were sign of dependence: seeking help, seeking physical contact, seeking proximity, seeking attention and recognition”.*<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi di atas, kemandirian ditandai oleh adanya inisiatif, berusaha mengatasi rintangan yang ada dalam lingkungannya, mencoba melakukan aktifitas menuju kesempurnaan, memperoleh kepuasan dari pekerjaannya dan mengerjakan pekerjaan rutin sendiri, sedangkan ketergantungan lawan kata dari kemandirian, selalu berhubungan dengan orang lain, selalu berdekatan mengharapkan perhatian dan menginginkan penghargaan.

Hetherington menyatakan bahwa kemandirian menunjukkan kepada adanya kemampuan untuk mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, penuh ketekunan, mengatasi sendiri kesulitannya dan ingin melakukan hal – hal untuk dan oleh dirinya sendiri. Smart M.S dan Smart R.C berpendapat bahwa: *“independency is marked with self confidence, have own goal and self control, explorative, being able and statisty of his job”*. (kemandirian ditandai oleh adanya kepercayaan diri, mempunyai tujuan, dan kontrol diri, eksploratif, mampu dan puas atas pekerjaannya)<sup>26</sup>

Antonious berpendapat bahwa kemandirian merupakan suatu keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Kemandirian merupakan kemampuan mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan nyata untuk menghasilkan sesuatu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya.<sup>27</sup>

Pada beberapa definisi di atas terutama difokuskan pada definisi ketiga dapat diketahui bahwa kemandirian merupakan kondisi seseorang yang terwujud pada keadaan yang tidak selalu menggantungkan diri pada orang lain. Kemandirian dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkannya.

#### **D. Gagasan Penting Mengenai Kemandirian Santri di Pondok Pesantren**

Di antara lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, pendidikan agama dalam bentuk pondok pesantren merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke 13 M. Beberapa abad kemudian, lembaga pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian.<sup>28</sup> Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para peserta didik (santri) yang kemudian disebut dengan pondok pesantren. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu lembaga pendidikan ini dianggap bergengsi. Di lembaga ini kaum Muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan.<sup>29</sup> Pondok pesantren yang secara istilah teknis berarti tempat tinggal santri ini memiliki aspek historis yang cukup lama dan sudah mengakar sebagai *subkultur* dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.

Pondok pesantren menurut Mastuhu sebagaimana yang dikutip oleh Abudin Nata<sup>30</sup> adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan

<sup>25</sup> Diunduh dari [www.pendidikan.com](http://www.pendidikan.com), tanggal 17 Oktober 2011

<sup>26</sup> Diunduh dari [www.pendidikan.com](http://www.pendidikan.com) tanggal 17 November 2011

<sup>27</sup> Diunduh pada <http://tugasayan.blogspot.com/2010/10/kemandirian.ht> ml.

<sup>28</sup> Depag, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004)h. 1

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, ( Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 35

menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Sedangkan Djamaludin<sup>31</sup> mengemukakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama yang santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di tangan kepemimpinan seorang kyai dengan ciri-ciri yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

Pendapat Abudin Nata lebih menekankan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wahana internalisasi ajaran-ajaran Islam. Sedangkan pendapat Djamaludin lebih menitikberatkan pada karakteristik pondok pesantren yang mempunyai otoritas kyai yang bersifat kharismatik. Dari kedua definisi di atas, kita dapat mengetahui bahwa pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang mempunyai ciri khas pelaksanaan pendidikan tertentu juga ditandai dengan otoritas kyai sebagai pemimpin yang berbeda dengan otoritas kepemimpinan pada lembaga pendidikan yang lain

Dalam struktur pendidikan nasional, pondok pesantren merupakan mata rantai yang sangat penting. Hal ini tidak hanya karena sejarah kemunculannya yang cukup lama, tetapi juga karena pondok pesantren telah secara signifikan ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sejarahnya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat (*society-based education*). Kenyataannya pondok pesantren sudah mengakar dan tumbuh di masyarakat, kemudian dikembangkan oleh masyarakat, sehingga kajian mengenai pondok pesantren sebagai sentra pengembangan masyarakat sangat menarik beberapa peneliti akhir-akhir ini.<sup>32</sup>

Ciri umum yang dapat diketahui adalah pondok pesantren memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Beberapa peneliti menyebut sebagai sebuah *subkultur* yang bersifat *idiosyncratic*. Cara pengajarannya unik. Sang kyai yang biasanya adalah pendiri sekaligus pemilik pondok pesantren, membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab<sup>33</sup>, sementara para santri mendengarkan sambil membuat catatan pada kitab yang sedang dibaca. Metode ini dikenal dengan istilah sorogan. Kegiatan pembelajaran di atas berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat dan biasanya dengan memisahkan jenis kelamin (*gender*) santri. Perkembangan awal pondok pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan tipologi unik lembaga pondok pesantren yang berkembang hingga sekarang.<sup>34</sup>

Pondok pesantren sebagai komunitas santri yang memfokuskan pada totalitas belajar tentang studi keislaman, merupakan harapan umat dalam membangun peradaban Islam pada masa mendatang dan membentuk tatanan masyarakat Indonesia yang harmonis dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Hal ini mengarah pula pada pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia.<sup>35</sup>

Pondok pesantren sebagai sosok miniatur masyarakat merupakan gambaran tatanan masyarakat yang mikro, segala aktivitas pemikiran, perilaku, dan kebiasaan diarahkan pada tatanan kesatuan dalam keberagaman. Kesatuan dalam arti bahwa aktivitas pondok pesantren diarahkan pada satu tujuan yaitu tercapainya masyarakat yang harmonis dan Islami.<sup>36</sup>

Pondok pesantren mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, karena peranan utama pondok pesantren adalah peranan pendidikan. Sistem pendidikan di pondok pesantren berbeda dengan sistem

<sup>31</sup>Djamaludin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 99

<sup>32</sup>Depag, *Pengembangan Metodologi Pembelajaran di Salafiyah*, (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 1

<sup>33</sup> Dikenal dengan istilah *kitab kuning*

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>35</sup> HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 46.

<sup>36</sup> Anonimous, *Majalah Tradisi*, edisi September, 2000



pendidikan yang terdapat pada lembaga pendidikan umum. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi metodologi pendidikan dan otoritas pimpinan lembaga. Dalam hal ini, pondok pesantren dipimpin oleh kyai yang mempunyai otoritas dalam mengelola dan menerapkan metodologi pendidikan. Hal ini menjadi ciri perbedaan yang fundamental antara pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan tujuan pendidikan di pondok pesantren, semangat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya terealisasi dalam kecerdasan terhadap penguasaan ilmu-ilmu agama. Kecerdasan terhadap penguasaan ilmu-ilmu umum, mutlak diperlukan. Pondok pesantren tidak hanya mampu untuk mentransformasikan pengetahuan agama melainkan mensinergikannya dengan perkembangan ilmu-ilmu umum, sebagai prasyarat untuk membentuk masyarakat pondok pesantren kritis, inovatif, dan kompetitif.<sup>38</sup>

Dari sudut pandang pendidikan konvensional, pondok pesantren merupakan sebuah subkultur. Pondok pesantren cukup memiliki persyaratan untuk dinamai subkultur, sebab memiliki cara hidup tersendiri yang dengan fanatik dijalani oleh para anggota masyarakat pondok pesantren, adanya hirarki tersendiri, yang berdiri sejajar tetapi berada di luar hirarki penguasa setempat, kriteria etik yang lain daripada kriteria yang digunakan di sekitarnya dan beberapa ciri yang lain yang dapat menunjang pondok pesantren sebagai subkultur.

Pondok pesantren walaupun intinya bertindak sebagai lembaga pendidikan, namun dalam rangka menghadapi kemajuan zaman ia pun mampu berfungsi sebagai lembaga lainnya. Mengenai hal ini Zaini Dahlan<sup>39</sup> menyebutkan fungsi-fungsi lembaga pondok pesantren tersebut diantaranya, yaitu:

pertama, pondok pesantren sebagai lembaga dakwah. Dalam posisi ini, ia bisa menempatkan dirinya sebagai inovator, motivator, dan transformator demi kemajuan umat. Kedua, pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan ulama. Ketiga, pondok pesantren sebagai lembaga pengembang pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan. Keempat, pondok pesantren sebagai lembaga pengembang masyarakat.

Walaupun perubahan terus bergulir di dunia pondok pesantren, semua perubahan tersebut tidak melepaskan sisi kulturalnya. Secara umum pondok pesantren tetap memiliki fungsi-fungsi sebagai: (1) lembaga pendidikan yang mentransfer ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam, (2) lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial, dan (3) lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial.<sup>40</sup>

Fungsi pertama merupakan fungsi utama pondok pesantren dan merupakan faktor utama orang tua mengirimkan anaknya ke pondok pesantren. Meskipun kini terdapat kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah umum semakin besar-dengan alasan mudah dalam memperoleh pekerjaan- dalam kenyataannya pondok pesantren baru masih bermunculan, terutama pondok pesantren salafiyah.<sup>41</sup>

Kemandirian peserta didik, di samping pencapaian kecerdasan intelektual dan penguasaan keterampilan, merupakan modal dasar dalam rangka pendewasaan dan persiapan menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Nilai-nilai kemandirian yang direpresentasikan oleh pondok pesantren menjadi praksis pendidikan yang penting sebagai refleksi atas pencapaian tujuan pendidikan yang berkembang sekarang ini.

Istilah mandiri; kemandirian; dalam tulisan ini dapat dipandang oleh dua pendekatan. Pertama, kemandirian dalam perspektif ilmu pendidikan. Kedua, kemandirian dalam perspektif psikologi pendidikan.

Dalam konteks ilmu pendidikan, kemandirian merupakan salah satu karakter

<sup>37</sup> Marzuki Wahid, *et.al*, *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 14.

<sup>38</sup> Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1999), h. 43.

<sup>39</sup> Zaini Dahlan, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta :LPKSM, 1995), h. 103

<sup>40</sup> Depag, *Grand Design*, *op.cit.*, h. 5

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 6

yang dikembangkan dalam pendidikan. Dalam konteks ilmu pendidikan, kemandirian merupakan sebuah capaian indikator tujuan pendidikan di samping capaian kemampuan intelektual. Sebab, pendidikan tidak hanya mengantarkan manusia menjadi cerdas, melainkan membentuk manusia yang mandiri. Sementara dalam perspektif psikologi pendidikan, kemandirian merupakan sebuah ciri mentalitas tertentu yang melekat pada diri seseorang yang dapat dilihat dalam perwujudan sikap dan tingkahlaku.

Banyak pemikir, khususnya yang mendalami kajian psikologi yang telah memberikan definisi mengenai kemandirian. Kata mandiri secara etimologis berarti keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.<sup>42</sup>

Masrun menyebutkan bahwa kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas; melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain; mampu berpikir; bertindak kreatif; penuh inisiatif; mampu mempengaruhi orang lain; mempunyai rasa percaya diri; dan memperoleh kepuasan hasil usahanya.<sup>43</sup>

Secara psikologis, kemandirian dalam pandangan Kartini Kartono dapat dilihat pada waktu seseorang menghadapi masalah. Bila masalah tersebut dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain dan akan bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang telah diambil, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk mandiri.<sup>44</sup>

Sutari Imam Barnadib menyebutkan bahwa kemandirian merupakan perilaku yang mampu berinisiatif; mampu mengatasi hambatan; mempunyai rasa percaya diri; dan dapat melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat Barnadib diperkuat oleh pendapat Kartini dan Dali yang

menyatakan bahwa kemandirian merupakan hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disebutkan bahwa kemandirian mengandung beberapa pengertian:

1. Keadaan seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya;
2. Kemampuan mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi;
3. Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas; dan
4. Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan.<sup>46</sup>

Kajian dalam tulisan ini mempunyai kecenderungan fokus pada wilayah kajian ilmu pendidikan. Fokus tersebut memberikan indikasi bahwa tema dan kondisi yang diteliti berkaitan dengan kemandirian merupakan salah satu indikator atau point tertentu dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

1. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan yang hendak dicapai adalah peserta didik yang mandiri.
2. Kebijakan pendidikan nasional tahun 2010 yang memfokuskan pada penguatan dan internalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Kemandirian merupakan salah satu nilai internalisasi karakter yang diharapkan dalam delapan belas (18) nilai pendidikan karakter.
3. Pondok pesantren tradisional sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik khas menunjukkan kondisi yang tetap eksis mengenai pola kehidupan santri yang mandiri.

Ketiga asumsi yang digunakan sebagaimana disebutkan di atas menguatkan bahwa pendidikan kemandirian penting untuk dikembangkan. Pondok pesantren dipandang memiliki kekuatan tertentu untuk membentuk

<sup>42</sup> Diunduh dari <http://www.artikata.com/arti-339676-mandiri.html>

<sup>43</sup> Diunduh dari <http://tugasayan.blogspot.com/2010/10/kemandirian.html>.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Diunduh dari <http://daffodilmuslimah.multiply.com.journal/item/162>

<sup>46</sup> *Ibid.*

kemandirian santri dibandingkan dengan lembaga pendidikan sekolah.

Pendekatan ilmu pendidikan dalam hal ini sebagaimana dipaparkan di atas tidak bisa dilepaskan dari pandangan psikologi. Sebab, terma atau konsep kemandirian banyak dijelaskan pada wilayah kajian psikologi terutama pada perwujudan kemandirian dalam suatu pola perilaku tertentu. Berdasarkan asumsi ini, pendekatan yang digunakan merupakan konvergensi antara kajian ilmu pendidikan sebagai wilayah kajian dan pendekatan psikologi sebagai fokus pada eksposisi teori kemandirian.

Berkaitan dengan pondok pesantren, lembaga ini tetap dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mampu menerapkan kemandirian pada santrinya sebagai sebuah bekal kehidupan baik dalam situasi kehidupan pondok pesantren maupun setelah santri tersebut menjadi alumni. Kemandirian santri di pondok pesantren setidaknya dikuatkan oleh beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pondok pesantren menanamkan prinsip kemandirian dalam proses pembelajaran (pengajian) dan kurikulum;
2. Pondok pesantren memberikan bekal berbagai macam *life skill* keterampilan pada santri sehingga mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan *leadership* (kepemimpinan) dan mengarahkan aplikasinya pada saat santri masih di pondok pesantren atau sudah terjun ke masyarakat;
4. Pondok pesantren memberikan bekal pengetahuan *entrepreneursip* (kewirausahaan) kepada santri agar mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan lingkungan sosialnya;
5. Pondok pesantren tetap mempertahankan cara hidup yang penuh "ikhtiar", tidak mengandalkan cara hidup yang instan.

Kemandirian tidak hanya dibentuk oleh dorongan pribadi. Faktor luar dapat mempengaruhi individu atau komunitas tertentu untuk mandiri. Dikaitkan dengan pondok pesantren, lingkungan sosial pondok

pesantren, peranan dan konsep kyai mengenai hidup, dan sarana yang dimiliki oleh pondok pesantren dapat mendorong santri untuk berperilaku mandiri. Sebagai sebuah contoh, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, santri melakukan proses masak sendiri, mencari bahan sendiri, mengolah panganan makanan sendiri; dalam pemenuhan kerapian berpenampilan, mereka mencuci dan menyetrika sendiri; merapikan tempat tidur sendiri; pembelajaran mandiri (seperti dalam penerapan metode sorogan); dan perilaku lainnya. Hal ini semakin menunjukkan sebuah asumsi bahwa pondok pesantren khususnya pondok pesantren tradisional masih tetap mempertahankan penerapan pendidikan yang berbasis pada kemandirian diri.

#### **E. Penutup**

Pada pemaparan di atas terdapat sebuah penjelasan bahwa pondok pesantren lebih memberikan kesempatan kepada santri untuk hidup mandiri. Pondok pesantren yang dimaksud adalah pondok pesantren salafi, bukan pondok pesantren khalafi (modern). Pondok pesantren salafi memiliki karakter yang dapat mendorong santri untuk hidup mandiri dengan indikator minimal dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan di pondok.

Berbeda dengan pondok pesantren modern, pemenuhan kebutuhan kehidupan sudah diatur, diatasi, dan dikelola oleh pihak pengelola pondok. Santri tidak melakukan sendiri pemenuhan kebutuhan sendiri. Pemenuhan kebutuhan pangan, mencuci pakaian, bahkan menyetrika misalnya, semuanya sudah dikelola oleh pihak pondok. Di pondok pesantren modern, santri hanya belajar, tidak terganggu oleh pekerjaan lain. Pengkondisian yang fokus pada belajar mendorong santri untuk serius dalam belajar dalam mencapai mutu pembelajaran yang baik. Akan tetapi, terdapat aspek pendidikan kemandirian yang belum tersentuh terutama dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sendiri.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan mencuci pakaian sendiri merupakan sebuah bentuk kemandirian santri. Pekerjaan seperti ini menjadi modal bagi santri untuk melakukan hidup dengan mandiri. Pekerjaan

sederhana seperti makan dan mencuci tidak mengandalkan orang lain, tapi dilakukan dengan sendiri. Salah satu ciri kemandirian merupakan perilaku yang tidak mengandalkan orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa*, Jakarta: Kemendiknas, 2010

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa)*, Jakarta: Kemendiknas, 2010

Depag, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004

Depag, *Pengembangan Metodologi Pembelajaran di Salafiyah*, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004

Djamaludin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

HM Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999

<http://daffodilmuslimah.multiply.com.journal/item/162>

<http://tugasayan.blogspot.com/2010/10/kemandirian.html>.

<http://tugasayan.blogspot.com/2010/10/kemandirian.html>.

Karel A Stenbrink.. *Pondok pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994

M.Dawam Rahadjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1988

Martin Van Bruissen. *Kitab Kuning: Pondok pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995

Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam*, Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1999

Marzuki Wahid, et.al, *Pondok pesantren Masa Depan*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 2002

Muhammad Said, *Pendidikan dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Tarsito, 1987

Nurchalish Madjid, *Bilik-Bilik Pondok pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997

[www.artikata.com/arti-339676-mandiri.html](http://www.artikata.com/arti-339676-mandiri.html)  
[www.pendidikan.com](http://www.pendidikan.com), tanggal 17 Oktober 2011

Zaini Dahlan, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta :LPKSM, 1995

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES